

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

**NAMA : TRI JULITA PUTRI
NIM : 19622072**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

NAMA : TRI JULITA PUTRI

NIM : 19622072

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

NAMA : TRI JULITA PUTRI
NIM : 19622072

Menyutujui,

Pembimbing Pertama,



Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak, Ak., CA
NIDK. 8935830022 / Lektor

Pembimbing Kedua,



Afrivadi, S.T., M.E
NIDN.1003057101 / Lektor

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Hendy Satria, S.E., M.Ak, CAO., CBFA., CPFRA
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

NAMA : TRI JULITA PUTRI
NIM : 19622072

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Puluh Tujuh Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima

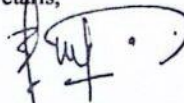
Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Nurfitri Zulaida, S.E., M.Ak, Ak., CA
NIDK. 8935830022 / Lektor

Sekretaris,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

Anggota,



M. Isa Alamsyahbana, S.E., M.Ak., CPFRA
NIDN. 1025129302 / Lektor

Tanjungpinang, 27 Desember 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,



Charly Marlinda, S.E., M.Ak.Ak.CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Tri Julita Putri
NIM : 19622072
Tahun Angkatan : 2019
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,43
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh *Good Governance* Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 27 Desember 2023
Penulis,



TRI JULITA PUTRI
NIM 19622072

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT dan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas Karunia-Nya yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga tiada alasan untuk penulis berhenti bersyukur.

Segala perjuangan dan usaha saya hingga dititik ini, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

“Papa dan Mama”

Terima kasih kepada papa dan mama, terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat dan selalu berusaha menjadi terbaik untuk adek sehingga adek bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk kasih sayang yang selama ini papa dan mama berikan, hingga anakmu mempunyai gelar sarjana atas izin dan ridho Allah SWT.

HALAMAN MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah 94: 5)

“ Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al-Baqarah 2: 153)

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”

(Q.S At-Talaq: 4)

“ Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

“There is no pressure when you are making a dream come true”

(Neymar Jr)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada program Strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian proposal ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA. selalu Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Muhammad Rizki, S.Psi., M.HSc selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO., CBFA., CPFRA selaku Ketua Program Studi 1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

6. Ibu Nurfitri Zulaika, S.E. M.Ak, Ak., CA selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberi arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Afriyadi, S.T., M.E selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, saran dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang yang telah memberi dukungan dan ilmunya.
9. Kedua orang tuaku tercinta, terutama papa dan mama semoga selalu diberi kesehatan, terima kasih atas segala pengorbanan, perjuangan, kasih sayang, *support*, kesabaran, keikhlasan serta do'a yang selalu dipanjatkan selama ini.
10. Abang dan kakak yang selama ini memberikan *support* dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk kedua kucingku ciko dan piko yang selalu menemani dalam penulisan skripsi ini.
12. Untuk ila, kayla, maisa, afni, nurul, dan ica terima kasih telah menemani dan memberi semangat dalam pembuatan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat sedari dulu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih selalu memberikan motivasi serta dukungan.
14. Teman-teman Akuntansi angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun untuk melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata,

semoga skripsi yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Tanjungpinang, 27 Desember 2023
Penulis,

TRI JULITA PUTRI
NIM 19622072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Ilmiah.....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori.....	12
2.1.1 Akuntansi.....	12
2.1.1.1 Akuntansi Pemerintahan	13
2.1.1.2 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan	13
2.1.1.3 Tujuan Akuntansi Pemerintahan	14
2.1.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan	15
2.1.2 <i>Good Governance</i>	16
2.1.2.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	16
2.1.2.2 Tujuan <i>Good Governance</i>	17

2.1.2.3 Indikator <i>Good Governance</i>	17
2.1.3 Sistem Pengendalian Internal	19
2.1.3.1 Tujuan Sistem Pengendalian Internal	20
2.1.3.2 Indikator Sistem Pengendalian Internal	20
2.1.4 Definisi Keuangan Daerah	22
2.1.4.1 Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah	23
2.1.4.2 Azas-Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ..	23
2.1.4.3 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah	24
2.1.5 Definisi Laporan Keuangan.....	25
2.1.5.1 Tujuan Laporan Keuangan.....	26
2.1.5.2 Kualitas Laporan Keuangan.....	28
2.1.5.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan.....	30
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	32
2.2.1 Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	32
2.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	33
2.2.3 Hubungan <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	35
2.3 Kerangka Pemikiran.....	35
2.4 Hipotesis	36
2.5 Penelitian Terdahulu	36
2.5.1 Jurnal Nasional	36
2.5.2 Jurnal Internasional	38
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Jenis Data.....	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data	41
3.4 Populasi dan Sampel	42
3.4.1 Populasi	42
3.4.2 Sampel.....	42

3.5 Definisi Operasional Variabel	43
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
3.7.1 Uji Kualitas Data	45
3.7.1.1 Uji Validitas	45
3.7.1.2 Uji Reliabilitas.....	46
3.7.2 Uji Asumsi Klasik.....	46
3.7.2.1 Uji Normalitas	46
3.7.2.2 Uji Multikolonieritas	46
3.7.2.3 Uji Heterokedastisitas	47
3.7.3 Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	47
3.7.4 Pengujian Hipotesis.....	48
3.7.4.1 Uji Statistik T	48
3.7.4.2 Uji Statistik F	49
3.7.4.3 Uji Koefisien Determinasi Berganda	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	51
4.1.1 Gambaran Umum Mengenai Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	51
4.1.1.1 Visi dan Misi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	51
4.1.1.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	52
4.1.1.3 Tugas dan fungsi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau	53
4.1.2 Karakteristik Responden	54
4.1.2.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
4.1.2.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	55
4.1.2.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	56
4.1.2.4 Identitas Responden Berdasarkan Lama Bekerja	56
4.1.3 Deskriptif Tanggapan Responden.....	57
4.1.3.1 Variabel <i>Good Governance</i> (X1)	57

4.1.3.2 Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2).....	64
4.1.3.3 Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	69
4.1.4 Uji Kualitas Data	73
4.1.4.1 Uji Validitas	73
4.1.4.2 Uji Reliabilitas.....	74
4.1.5 Uji Asumsi Klasik.....	75
4.1.5.1 Uji Normalitas	75
4.1.5.2 Uji Multikolinieritas	77
4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas.....	78
4.1.6 Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	79
4.1.7 Pengujian Hipotesis.....	80
4.1.7.1 Uji Parsial (Uji T).....	80
4.1.7.2 Uji Simultan (Uji F).....	82
4.1.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	83
4.2 Pembahasan	84
4.2.1 Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	84
4.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	85
4.2.3 Pengaruh <i>Good Governance</i> Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	85
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
<i>CURRICULUM VITAE</i>	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel 1.1	Hasil Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau	2
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	42
Tabel 3.2	Teknik Pengolahan Data Skala Likert.....	44
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	54
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	55
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	56
Tabel 4.5	Tanggapan Responden Untuk Variabel <i>Good Governance</i>	57
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Untuk Variabel Sistem Pengendalian Internal .	63
Tabel 4.7	Tanggapan Responden Untuk Variabel Kualitas Laporan Keuangan...	69
Tabel 4.8	Hasil Uji Validitas	73
Tabel 4.9	Hasil Uji Reliabilitas	74
Tabel 4.10	Hasil Uji Multikolinearitas	77
Tabel 4.11	Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	79
Tabel 4.12	Hasil Uji Secara Parsial (Uji T)	81
Tabel 4.13	Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)	82
Tabel 4.14	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	83

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Hal
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas Histogram.....	77
Gambar 4.2	Hasil Uji Normalitas Q-Q Plot.....	78
Gambar 4.3	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Kuesioner
Lampiran 2	Tabulasi Data Kuesioner
Lampiran 3	Daftar Nama Responden
Lampiran 4	Hasil Pengolahan Data JASP
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Surat Izin Penelitian
Lampiran 7	Persentase Plagiat

ABSTRAK

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tri Julita Putri. 19622072. Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang
Trijulitaputri27@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah *good governance* dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 87 responden dengan menggunakan teknik sampel *Non Probability* yaitu *Purposive Sampling*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini merupakan pegawai pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan penelitian kepustakaan. Dimana responden mengisi kuesioner sebanyak 32 butir pernyataan yang berkaitan dengan variabel yang diukur. Teknik analisis data menggunakan aplikasi *Jeffrey's Amazing Statistic Program (JASP) Versi 18.1*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* (X1) dan sistem pengendalian internal (X2) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Dengan semakin baiknya penerapan *good governance* maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan, dengan diterapkan sistem pengendalian internal akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa *good governance* dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *good governance* dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada badan keuangan dan aset daerah provinsi kepulauan riau. Berdasarkan hasil uji F membuktikan bahwa F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan tingkat singnifikasi kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *good governance* dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada badan keuangan dan aset daerah provinsi kepulauan riau.

Kata Kunci : *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan

Dosen Pembimbing 1 : Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak, Ak., CA.

Dosen Pembimbing 2 : Afriyadi, S.T., M.E.

ABSTRACT

THE EFFECT OF GOOD GOVERNANCE AND INTERNAL CONTROL SYSTEMS ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS AT REGIONAL FINANCIAL AGENCIES AND ASSET RIAU ISLANDS PROVINCE

Tri Julita Putri. 19622072. Accounting. STIE Pembangunan Tanjungpinang
Trijulitaputri27@gmail.com

The purpose of this study was to determine the effect of good governance and internal control systems on the quality of financial reports at the financial and asset management agency riau islands province region. The study used a sample of 87 respondents using a non probability sampling technique, namely purposive sampling.

The method used in this research is a quantitative method. The object of research in this study is an employee at regional financial agencies and asset riau island province. Data collection was carried out by distributing questionnaires and literature research. Where respondents filled out a questionnaire of 32 statements related to the variables being measured. The data analysis technique used is the Jeffrey's Amazing Statistics Program (JASP) application version 18.1.

The result of this study indicate that the good governance (X1) and internal control system (X2) affect the quality of financial reports (Y). The better the implementation of good governance, the better the quality of financial reports. Implementing an internal control system will have an impact on improving the quality of financial reports. It can be concluded that good governance and internal control systems influence the quality of financial reports.

The conclusion of this research is that good governance and internal control systems influence the quality of financial reports in financial agencies and regional assets in the riau Islands province. Based on the results of the F test, it proves that the calculated F is greater than the F table value and the singnification level is less than 0.05. So it can be concluded that good governance and internal control systems have a significant effect on the quality of financial reports in financial bodies and regional assets in the riau Islands province.

Keywords : good governance, internal control system, quality of financial reports

Dosen Pembimbing 1 : Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak, Ak., CA.

Dosen Pembimbing 2 : Afriyadi, S.T., M.E.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak tuntutan terhadap pemerintah daerah saat ini, baik dari segi internal yaitu meningkatkan kinerja yang optimal maupun dari segi eksternal yaitu tuntutan dari masyarakat yang menginginkan agar pemerintah daerah mampu mewujudkan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera. sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengutamakan akuntabilitas hasil dan peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah daerah wajib memberikan informasi keuangan yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Pemerintah daerah wajib untuk memiliki sistem informasi keuangan yang memadai, transparansi, dan akuntabilitas dengan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD disusun untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada publik, sehingga kandungan informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas harus memenuhi karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyebutkan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Kualitas pelaporan keuangan mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas baik akan menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas juga tentunya adalah laporan keuangan yang mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan.

Apabila LKPD disusun sesuai dengan SAP, maka kualitas pelaporan keuangan dianggap memenuhi karakteristik kualitatif yang ditentukan. Laporan keuangan yang dihasilkan mampu menyediakan informasi secara wajar dan transparan. Semakin tinggi kualitas laporan keuangan, maka semakin baik pula tingkat informasi yang disajikan dalam laporan tersebut. Dalam menjamin kualitas laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan meninjau LKPD. Kualitas LKPD dicerminkan oleh opini yang diberikan oleh BPK. Terdapat 4 jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar), TMP (Tidak Memberikan Pendapat).

Tabel 1.1
Hasil Opini BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

Hasil Opini BPK				
Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa opini yang diberikan oleh BPK

RI atas LKPD Provinsi Kepulauan Riau yang diperoleh melalui <https://kepri.bpk.go.id/> pada periode tahun 2018-2022 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berarti laporan yang disajikan telah menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan sudah optimal.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terwujudnya kualitas laporan keuangan adalah menurut Mahmudi, (2019), kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh Sistem Informasi Akuntansi, *Good Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal. Dari beberapa faktor-faktor tersebut maka penulis memilih 2 variabel yaitu *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal. Karena berdasarkan <https://ppid.kepriprov.go.id/> yang berhasil diakses, terdapat permasalahan yang terjadi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki keterkaitan dengan variabel *good governance* dan sistem pengendalian internal.

Pertama, rendahnya kualitas sarana prasarana, tingkat disiplin aparatur, serta kurang optimalnya efisiensi dan efektivitas pelayanan perkantoran mengindikasikan kekurangan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*. Menurut Mardiasmo, (2018), *good governance* mencakup pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas. Ketidakoptimalan dalam sarana prasarana serta rendahnya tingkat disiplin aparatur dapat merugikan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, yang seharusnya menjadi fokus utama *good governance*.

Kedua, belum optimalnya pengelolaan dan pengadministrasian keuangan dan anggaran, administrasi penerimaan daerah, serta pembiayaan menciptakan

hubungan dengan aspek *good governance*, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Menurut Priansa, (2017), *good governance* melibatkan akuntabilitas dan transparansi/keterbukaan. Kurangnya pengelolaan dan pengadministrasian keuangan yang baik dapat menciptakan ketidakpastian terkait alokasi anggaran, yang dapat merugikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses kebijakan keuangan.

Ketiga, belum optimalnya administrasi aset, dan pengamanan aset. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal mencakup prosedur untuk mengamankan aset agar tercapainya tujuan organisasi.

Komponen yang perlu untuk ditingkatkan agar dapat mendukung dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sistem pengendalian internal yang andal. Menurut Rahman et al., (2023), dengan menerapkan prinsip prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sedangkan menurut Philadelphia et al., (2020), dengan adanya *good governance* maka pemerintahan diberi kewenangan yang diharapkan dapat menjalankan pengelolaan pemerintahan yang baik dan terbuka oleh publik, dengan terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintahan daerah dengan para pengguna informasi keuangan pemerintah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk menjadi acuan agar terwujudnya pemerintahan yang kinerjanya dipercaya

oleh masyarakat. Sementara itu dengan adanya sistem pengendalian internal maka pemerintah yang diberi kewenangan yang diharapkan dapat mengambil keputusan yang terbaik dan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian internal yang efektif maka akan tersusun pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. Semakin efektif sistem pengendalian internal yang diharapkan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin baik juga.

Good governance merupakan suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. *Good Governance* adalah tata kelola pemerintah yang baik dalam mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia swasta dan masyarakat. Pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan meningkatnya kemandirian, transparansi dan akuntabilitas, respon terhadap masyarakat, partisipasi publik, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan, serta demokratisasi daerah. Hal ini perlu ditingkatkan, karena dengan adanya otonomi daerah maka aspirasi masyarakat semakin tinggi. Dengan adanya *good governance* di sektor publik dapat mendukung akuntabilitas yang efektif di pemerintah. Selain itu dengan integritas yang baik pemerintah dapat memberikan pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja yang transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku

Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Sistem pengendalian intern sebagaimana yang dimaksud telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pengertian yang diuraikan oleh *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO) yang mengartikan Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan peraporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dari dua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang memadai akan dapat membantu organisasi mencapai tujuannya.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) sangat penting untuk diterapkan di organisasi, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan. Dengan berfokus pada pelaporan, maka SPI yang diterapkan dengan memadai akan meningkatkan keandalan pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang andal merupakan salah satu karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, efektifitas, dan responsif merupakan bagian dari *good governance*. Sedangkan bagian dari pengendalian internal adalah lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan organisasi/perusahaan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasional, penyajian laporan keuangan yang dapat diandalkan dan kepatuhan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian menurut Philadhelphia et al., (2020), menunjukkan bahwa *Good Governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian menurut Rahmawati et al., (2018), menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian menurut Sari, (2022), menunjukkan bahwa *Good Governance* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *good governance* dan sistem pengendalian internal yang berdampak pada kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya yang akan dituangkan ke dalam

skripsi dengan judul “**Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Apakah *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau?
3. Apakah *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan kita dalam wawasan keilmuan yang berkaitan dengan *good governance*, sistem pengendalian internal dan laporan keuangan yang dimana kedua teori tersebut berdasarkan referensi yang relevan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan peneliti, terlebih dalam rangka menerapkan hasil-hasil studi mengenai pengaruh *good governance* dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan melakukan penelitian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat sebagai gambaran serta dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Kepulauan Riau yang berkaitan dengan pengaruh *good governance* dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini nantinya akan terdiri dari lima bab dimana tiap-tiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari masalah penelitian yang dilakukan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar pembahasan yang akan diteliti meliputi teori-teori dari peneliti terdahulu, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi sampel penelitian, hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan disertai saran-saran yang diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Akuntansi

Menurut Bahri, (2020), Akuntansi adalah pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa dan sistematis isinya berdasarkan standar yang diakui umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlakukan dan dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi. Dari definisi akuntansi tersebut menunjukkan bahwa akuntansi lebih kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Sehingga pada dasarnya akuntansi harus:

1. Menganalisa data mana yang berkaitan dan relevan dengan keputusan yang akan diambil.
2. Memproses pengelolaan data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Hasil dari suatu proses akuntansi disebut dengan laporan keuangan. Informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi tersebut dapat menjawab kebutuhan umum para pemakainya. Oleh karena itu laporan keuangan harus memiliki kualitas yang dapat diperlukan oleh berbagai pihak pemangku kepentingan.

2.1.1.1 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan tahapan dimana transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (seperti Kabupaten, Kota, Atau Provinsi) diidentifikasi, diukur, dicatat, dan dilaporkan. Tujuan dari proses ini adalah menyajikan informasi melalui laporan yang berguna bagi pihak-pihak internal dan eksternal pemerintah dalam pengambilan keputusan

Menurut Mahmudi, (2019), laporan keuangan pemerintah dapat digolongkan dalam tiga tingkatan yaitu :

1. Primer : yaitu Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
2. Sekunder : yaitu Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
3. Tersier : yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.1.1.2 Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Menurut Siregar, (2017), berdasarkan aspek keuangan, karakteristik lingkungan pemerintahan, yaitu :

1. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian. Kebijakan pemerintah dan target fiskal dituangkan dalam anggaran. Anggaran yang sudah disahkan merupakan alat pengendalian untuk memastikan program dijalankan sebagaimana yang disepakati dalam anggaran.
2. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Pemerintah mengalokasikan dana yang besar untuk investasi yang tidak

langsung menghasilkan pendapatan. Contoh investasi ini adalah investasi pada jalan dan jembatan.

3. Penggunaan akuntansi dana. Penggunaan akuntansi dana lazim di lingkungan pemerintahan. Penerapan akuntansi dana di Indonesia dimungkinkan. Dana merupakan entitas ekonomi dan entitas akuntansi yang disusun berdasarkan tujuan. Jenis dan jumlah dana yang dibentuk disesuaikan dengan tujuan.
4. Penyusutan aset tetap. Aset tetap yang digunakan oleh pemerintah memiliki masa manfaat yang terbatas. Karena masa manfaat terbatas, maka aset tetap tersebut harus didepresiasi.

2.1.1.3 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Hasanah, (2017), akuntansi pemerintahan memiliki beberapa tujuan yaitu :

1. Akuntabilitas

Fungsi akuntabilitas tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, melainkan juga mencakup pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya dengan bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan fungsi manajerial dengan melakukan perencanaan berupa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan strategi pembangunan lain.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan dirancang agar memudahkan pengawasan pengelolaan keuangan negara oleh instansi pemeriksa seperti BPK-RI.

2.1.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintahan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Penerapan standar akuntansi di lingkungan pemerintah sangatlah penting, dan salah satu kunci transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan oleh sektor pemerintah itu sendiri. Fungsi Standar Akuntansi Pemerintah, sebagai sebuah acuan keseragaman yang dipakai bersama secara nasional dalam akuntansi pemerintahan, akan semakin memudahkan pemahaman berbagai unit kerja pemerintah dalam mengakuntansikan laporan keuangan serta menghindarkan interpretasi yang berbeda, yang dapat menimbulkan salah penafsiran akan akuntansi pemerintahan itu sendiri.

Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan mengenai kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan dan memberikan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, auditor dan pengguna laporan keuangan dalam mencari solusi atas permasalahan yang belum terselesaikan

dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2.1.2 Good Governance

2.1.2.1 Pengertian *Good Governance*

Menurut Mardiasmo, (2018), pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mengartikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kokoh dan bertanggung jawab yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan mencegah korupsi dalam ranah politik maupun administratif, melaksanakan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* untuk mendukung pertumbuhannya kegiatan usaha. Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu :

1. Reformasi Sistem Penganggaran (*Budgeting Reform*),
2. Reformasi Sistem Akuntansi (*Accounting Reform*),
3. Reformasi Sistem Pemeriksaan (*Audit Reform*) dan
4. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah (*Financial Management*

Reform).

2.1.2.2 Tujuan Good Governance

Good governance pada dasarnya bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan organisasi publik sesuai dengan tuntutan dan harapan publik. Secara khusus, maka *good governance* memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Memaksimalkan fungsi organisasi publik dengan cara mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* agar organisasi publik memiliki kemampuan untuk melayani publik dengan baik.
2. Mendorong pengelolaan organisasi publik secara professional, transparan, dan efisien, serta memperdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organisasi.
3. Mendorong organisasi untuk mampu membuat kebijakan yang sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitasnya yang dilandasi dengan nilai-nilai moralitas yang tinggi serta patuh terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku.
4. Meningkatkan kontribusi organisasi publik dalam pengembangan pelayanan publik dalam kerangka berbangsa dan bernegara.
5. Mensukseskan program-program kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2.1.2.3 Indikator Good Governance

Menurut Mardiasmo, (2018), memberikan beberapa indikator *good governance*, meliputi :

1. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Prinsip ini biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat.
3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
5. *Consensus Orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

Menurut Priansa, (2017), indikator good governance adalah sebagai berikut :

1. Keadilan (*Fairness*). Keadilan yang merupakan sebagai perlakuan yang sama terhadap pemegang saham.
2. Transparansi/Keterbukaan (*Disclosure/Transparency*). Adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja.
3. Akuntabilitas (*Accountability*). Pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan.

4. *Responsibilitas (Responsibility)*. Adanya tanggungjawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggung jawaban kepada perusahaan.
5. *Independen (Independency)*. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan.

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pengendalian Internal, menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mulyadi, (2015), pengendalian internal adalah pengendalian yang mencakup susunan organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk melindungi aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen.

Menurut Yulanda & Oktala, (2021), sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem yang mencakup struktur organisasi, semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa keakuratan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendukung kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang telah diterapkan.

2.1.3.1 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mahmudi, (2019), tujuan sistem pengendalian intern yaitu :

1. Guna melindungi aset (termasuk data) negara.
2. Guna menjaga catatan dengan rinci dan akurat.
3. Guna menciptakan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan.
4. Guna memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
5. Agar operasi berjalan efisien dan efektif.
6. Agar menjamin kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.3.2 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Indikator Sistem Pengendalian Internal yang diatur dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdiri dari lima indikator, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian resiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta dapat tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Indikator sistem pengendalian internal menurut Hery, (2019), sebagai berikut:

1. Penetapan tanggung jawab

Pengendalian atas pekerjaan akan menjadi lebih efektif jika hanya ada satu orang saja yang bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan tertentu.

2. Pemisahan tugas

Pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula.

3. Dokumentasi

Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi telah terjadi.

4. Pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik

Penggunaan pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik sangatlah penting untuk mengamankan aset.

5. Pengecekan independen atau verifikasi internal

Kebanyakan sistem pengendalian internal memberikan pengecekan independen atau verifikasi internal. Indikator ini meliputi peninjauan ulang, perbandingan, dan pencocokan data yang telah disiapkan oleh karyawan.

2.1.4 Definisi Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pengertian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka pengertian Keuangan Daerah dapat didefinisikan yaitu semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Siregar, (2017), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2.1.4.1 Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah

Agar keuangan daerah dapat terealisasi secara optimal, maka diperlukan suatu pengelolaan yang dinamakan dengan pengelolaan keuangan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Objek pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah.

2.1.4.2 Azas-Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah dikelola berdasarkan azas tertentu. Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat mematuhi peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, menjaga transparansi dan bertanggung jawab. Azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaannya.

Menurut Siregar, (2017), azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1. Tertib

Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Taat pada peraturan perundang-undangan

Keuangan daerah dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Efektif

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dan hasil.

4. Efisien

Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5. Ekonomis

Pemerolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

6. Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah

7. Bertanggungjawab

Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keadilan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

9. Kepatuhan

Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

10. Manfaat

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.1.4.3 Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi, (2019), siklus pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi

wewenang dan tanggung jawab pemerintahan daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, transparan, dan akuntabel. Siklus pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya, terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Tahap perencanaan,
2. Tahap pelaksanaan atau implementasi, dan
3. Tahap pelaporan dan evaluasi kinerja.

Pada setiap tahap di dalamnya dapat diklasifikasikan lagi apa menjadi *input*, proses, dan *output*. Karena ketiga tahap tersebut membentuk suatu siklus, maka *output* yang dihasilkan dari tahap tertentu akan menjadi *input* bagi tahap berikutnya. Sebagai contoh *output* yang dihasilkan dari tahap perencanaan akan menjadi *input* bagi tahap pelaksanaan, *output* dari tahap pelaksanaan akan menjadi *input* bagi tahap pelaporan dan evaluasi kinerja, dan *output* dari tahap pelaporan dan evaluasi kinerja akan menjadi *input* bagi tahap perencanaan periode berikutnya. Proses seperti itu akan terus berulang, sambung-menyambung dan saling berkaitan antara satu tahap ke tahap berikutnya dan membentuk suatu siklus.

2.1.5 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan di sektor publik ataupun swasta, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode.

Selanjutnya menurut Wastam, (2018), laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam menilai suatu perusahaan, karena informasi laporan keuangan itu dapat dianalisa apakah perusahaan itu baik atau tidak bagi yang berkepentingan. Berdasarkan konsep keuangan maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mencapai tujuannya.

2.1.5.1 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Siregar, (2017), laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan. Unit pemerintah menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual dan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang diatur dalam undang-undang. Pada dasarnya semua laporan keuangan tujuan umum disusun dengan menggunakan basis akrual. Namun karena anggaran negara/daerah masih disusun berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

Laporan keuangan diharapkan memberikan manfaat bagi pemakai untuk membuat keputusan. Agar bermanfaat, laporan keuangan diharapkan menyediakan informasi tentang :

1. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.

2. Kecukupan pendapatan dalam periode terkini untuk mendukung semua pengeluaran.
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang diterapkan dalam aktivitas pelaporan entitas serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Bagaimana entitas pelaporan mendanai keseluruhan kegiatannya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
5. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan terkait dengan sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pajak dan pinjaman.
6. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami pertumbuhan atau penurunan, sebagai hasil kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Menurut Siregar, (2017), untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset.
2. Kewajiban.
3. Ekuitas.
4. Pendapatan LRA.
5. Belanja.
6. Transfer.
7. Pembiayaan.
8. Saldo anggaran lebih.
9. Pendapatan LO.

10. Beban.

11. Arus kas.

Unsur-unsur di atas relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan. Akan tetapi unsur-unsur tersebut belum sepenuhnya memenuhi tujuan pelaporan keuangan. Karena itu informasi non-keuangan dalam catatan atas laporan keuangan diperlukan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap.

2.1.5.2 Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa karakteristik kualitatif. Menurut Sukamulja, (2019), karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah masyarakat yang mengerti tentang ekonomi dan keuangan.

2. Relevan

Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

4. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

5. Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.

6. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau

menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

7. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

8. Tepat waktu

Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

9. Keseimbangan antar biaya dan manfaat

Laporan keuangan dianggap berkualitas apabila manfaat atas informasi yang dihasilkan lebih besar dibanding biaya penyediaannya.

10. Netral

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila dalam proses penyusunannya dapat dipastikan terbebas dari upaya untuk memihak pada pandangan, peristiwa, dan pihak-pihak tertentu.

2.1.5.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Indikator kualitas laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Indikator kualitas laporan keuangan menurut Hery, (2017), sebagai berikut:

1. Dapat dipahami

Dalam penyajian laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh penggunanya sehingga laporan keuangan tersebut dapat dimengerti informasi yang terkandung didalamnya.

2. Relevan

Penyajian laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan penggunaannya, dengan cara penggunaannya untuk mengevaluasi kejadian dimasa lalu, masa sekarang atau kejadian yang akan datang.

3. Keandalan

Laporan keuangan memberikan informasi yang disajikan dengan andal. Informasi yang disajikan terbebas dari kesalahan, serta dapat diandalkan kebenarannya oleh pengguna informasi tersebut.

4. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah disajikan dari sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan yang terdapat pada entitas lainnya.

5. Konsisten

Penyajian laporan keuangan memiliki metode atau prinsip yang digunakan oleh suatu entitas dan tidak diperbolehkan berubah ubah.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Sari, (2022), dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, sehingga diharapkan kualitas pelayanan publik dan kualitas laporan keuangan akan semakin baik melalui tata kelola yang baik dan bersih tanpa adanya unsur-unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan Implementasi dari penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. *Good governance* merupakan

pengelolaan pemerintahan yang efektif untuk mendorong kemajuan di masa mendatang. Pemerintah dituntut agar dapat mengelola daerahnya sebaik-baiknya, memanfaatkan segala sumber daya yang ada guna kemakmuran masyarakat. Dengan menerapkan karakteristik *good governance* memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan pada masyarakat dan pemerintah secara efektif. Dengan adanya *good governance* maka pemerintah diharapkan dapat menjalankan pengelolaan pemerintah yang baik antara pemerintahan daerah dan para pemakai informasi keuangan pemerintah, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat. *Good governance* menjadi pedoman bagi instansi pemerintah untuk mencapai pemerintahan yang diakui oleh masyarakat. Dengan adanya *good governance*, dapat dibentuk pelaksanaan kinerja yang baik di bagian keuangan sehingga mempermudah dalam proses pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan informasi krusial diantara berbagai informasi lainnya, sehingga perlu diberikan perhatian serius guna memastikan kualitasnya. Apabila suatu pemerintah berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bermutu.

2.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Rahmasari, (2020), sistem pengendalian internal merupakan bentuk pengawasan pemerintah dalam mengendalikan pengelolaan keuangan daerah agar terlaksana secara transparan. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dapat menghindari kesalahan dan penyusunan laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengontrol dan mengevaluasi seluruh aktivitas dan tanggung jawab kegiatan. Untuk menjamin laporan keuangan yang berisikan informasi yang andal serta menjaga kelayakan laporan keuangan, diperlukan sebuah pengendalian internal yang baik. Adanya sistem pengendalian internal dapat mencegah terjadinya penggelapan atau *fraud*. Lemahnya sistem pengendalian internal dapat mengakibatkan terjadi penyimpangan dari laporan keuangan yang dihasilkan tersebut.

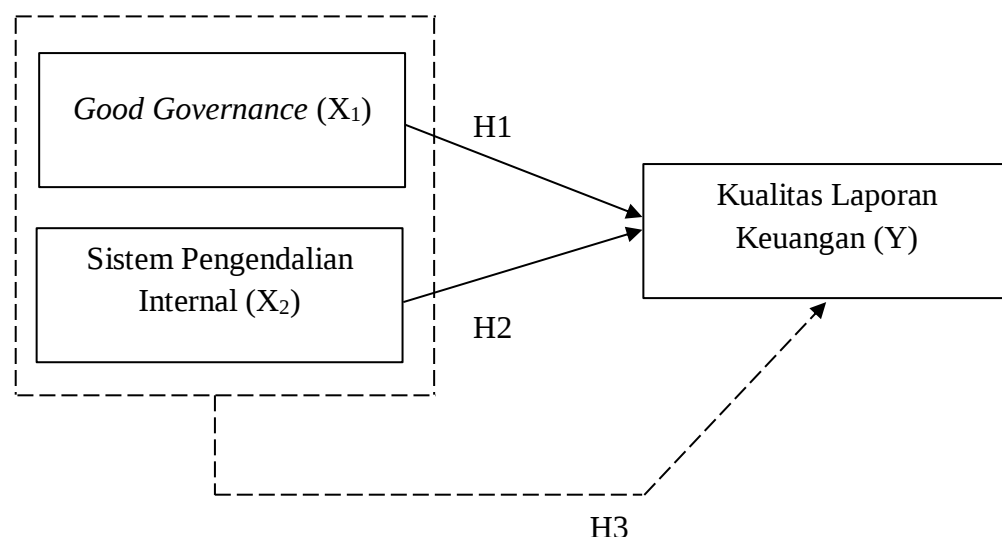
Dengan sistem pengendalian internal maka pemerintah diharapkan dapat mengambil keputusan yang terbaik dan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kualitas informasi dalam laporan keuangan yang baik tidak dapat terlepas dari implementasi pengendalian internal yang efektif. Penerapan sistem pengendalian internal berperan penting dalam meningkatkan mutu laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam hal keandalan laporan keuangan. Keberadaan pengendalian internal sangat essential untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Semakin efisien pengendalian internal yang dijalankan, semakin unggul pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak lepas dari penerapan pengendalian internal yang baik. Dengan diterapkan sistem pengendalian internal akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, terutama kualitas dalam hal keandalan laporan keuangan pemerintah.

2.2.3 Hubungan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Gita Saraswati & Budiasih, (2019), hubungan antara kualitas laporan keuangan dengan kedua variabel independen *good governance* dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif. Dengan menerapkan *good governance* dalam melakukan pengelolaan keuangan cenderung akan memiliki kualitas laporan keuangan yang baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap pemerintah pusat serta dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat. Sedangkan dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dan benar maka anggota instansi akan memiliki rasa yakin atas pelaporan keuangan akan sesuai dengan standar yang berlaku.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Diolah Peneliti (2023)

Keterangan :

—————→ = Pengaruh Variabel Secara Parsial

-----→ = Pengaruh Variabel Secara Simultan

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₁ : Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H₂ : Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H₃ : Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.5 Penelitian Terdahulu

2.5.1 Jurnal Nasional

1. Dalam jurnal Lis Maryani, (2013), dengan judul Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good governance* dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sampel penelitian ini diperoleh dari responden sebanyak 32 pegawai yang terdiri dari 14 pegawai bagian akuntansi dan pelaporan, 4 pegawai bidang aset, 4 pegawai bidang pendapatan, 4 pegawai bidang belanja dan pembiayaan, serta 6 pegawai pada bidang pendataan dan penagihan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial dan secara simultan *good governance* dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Dalam jurnal Khairunnas et al., (2021), dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD yang ada di lingkungan Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dengan menyebarkan langsung kuesioner dalam bentuk angket *google form* yang disebarkan kepada pegawai SKPD Kota Bima. Berdasarkan hasil yang diperoleh sebanyak 60 responden menyatakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota Bima.
3. Dalam jurnal Philadelphia et al., (2020), dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, *good governance*, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Metode yang digunakan dari penelitian ini

menggunakan teknik kuesioner. Penelitian ini dengan responden sebanyak 20 SKPD yaitu 16 dinas dan 4 badan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintah, dan *good governance* mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan daerah.

2.5.2 Jurnal Internasional

1. Dalam jurnal Afifah & Azwari, (2015), dengan judul *The Effect Of The Implementation Of Government Internal Control System (GICS) On The Quality Of Financial Reporting Of The Local Government And Its Impact On The Principles Of Good Governance : A Research In District, City, And Provincial Government In South Sumatera*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dan dampaknya terhadap *good governance*. Penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh. Unit observasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset di kabupaten, kota, dan provinsi di Sumatera Selatan dengan responden yang terdiri dari seluruh pimpinan masing-masing SKPD PPKAD/BPKAD dan Inspektorat. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Peningkatan pengendalian sistem pengendalian internal menjadi bagian sangat penting peranannya bagi kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.

2. Dalam jurnal Simon, (2016), dengan judul *The Role Of Apparatus Competence, Internal Control System On Good Governance And The Quality Of Financial Statement Information*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal terhadap *good governance* dan kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan terhadap 189 aparatur di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan pada *good governance*. Sedangkan sistem pengendalian internal dan *good governance* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Dalam jurnal Siahaya & Sandanafu, (2022), dengan judul *The Effect Of Good Governance Implementation, Government Accounting Standards, Effectiveness Of Internal Control System And Human Resource Quality On The Quality Of Regional Task Force Financial Statements*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi *good governance*, standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Populasi penelitian ini merupakan 90 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di provinsi Maluku dan masing-masing sampel terwakili oleh satu responden. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance*, standar akuntansi pemerintahan, dan

kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan efektivitas sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sebuah penelitian agar dapat berhasil dengan baik, maka perlu diadakannya perencanaan yang matang, fasilitas yang memadai, pengolahan data yang terampil dan penggunaan metode yang tepat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif.

Menurut Sujarweni, (2018), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif (pengukuran).

3.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Sugiyono, (2018), data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner yang telah diisi oleh pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi yang terpilih untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini diantaranya :

1. Kuesioner

Menurut Sugiyono, (2020), Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

2. Studi Kepustakaan

Menurut Al Arif & Mubarok, (2022), Studi kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan terhadap pustaka, artikel, jurnal, dan sejenisnya. Studi kepustakaan merupakan penelitian yang didominasi oleh pengumpulan data non lapangan sekaligus meliputi objek yang diteliti dan data yang digunakan untuk membicarakannya sebagai objek utama (primer) sekaligus sekunder.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono, (2018), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 217 pegawai.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono, (2018), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan sampel *Non Probability sampling* dengan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu sebanyak 87 pegawai. Adapun list nama responden dapat dilihat pada lampiran 3. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang bekerja dibidang

akuntansi dan pelaporan.

2. Pegawai pada bidang aset dan bidang anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Menurut Santosa, (2018), Definisi operasional adalah deskripsi tentang apa yang akan diamati (peubah) dan apa yang akan diukur (nilainya) sehingga dengan tepat dapat menentukan cara yang digunakan untuk mengukurnya.

Menurut Bahri, (2018), berdasarkan hubungan antar variabel, maka variabel dalam sebuah penelitian dikelompokkan menjadi :

1. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

2. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas merupakan tipe variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain.

Dalam penelitian ini dapat diidentifikasi variabel independen dan dependen sebagai berikut :

1. Variabel Independen (X_1) yakni *Good Governance*.
2. Variabel Independen (X_2) yakni Sistem Pengendalian Internal.
3. Variabel Dependen (Y) yakni Kualitas Laporan Keuangan.

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Bulir Pertanyaan
Kualitas laporan	Standar akuntansi pemerintahan	a. Relevan b. Keandalan	Skala Likert	1,2 3,4

Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Bulir Pertanyaan
keuangan (Y)	menjelaskan terdapat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. <i>Sumber : Peraturan Pemerintah RI, (2010)</i>	c. Dapat dibandingkan d. Dapat dipahami <i>Sumber : Peraturan Pemerintah RI, (2010)</i>		5,6 7,8
<i>Good Governance</i> (X ₁)	<i>Good governance</i> merupakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam melayani publik secara efektif. <i>Good governance</i> pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. <i>Sumber : Mardiasmo, (2018)</i>	a. <i>Participation</i> b. <i>Rule of law</i> c. <i>Transparency</i> d. <i>Responsiveness</i> e. <i>Consensus Orientation</i> f. <i>Equity</i> g. <i>Efficiency and effectiveness</i> <i>Sumber : Mardiasmo, (2018)</i>	Skala Likert	1,2 3,4 5,6 7,8 9,10 11,12 13,14
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif	a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian resiko c. Kegiatan pengendalian d. Informasi dan komunikasi e. Pemantauan pengendalian intern <i>Sumber :</i>	Skala Likert	1,2 3,4 5,6 7,8 9,10

Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Bulir Pertanyaan
	dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. <i>Sumber : Peraturan Pemerintah RI, (2008)</i>	<i>Peraturan Pemerintah RI, (2008)</i>		

Sumber : Data Diolah Peneliti (2023)

3.6 Teknik Pengolahan Data

Untuk mengukur presepsi responden dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono, (2018), skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Skor yang digunakan skala likert sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Teknik Pengolahan Data Skala Likert

Jawaban	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Cukup Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Data Diolah Peneliti (2023)

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu teknik untuk mengolah data penelitian yang telah diperoleh. Alat analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *Jeffrey's Amazing Statistics Program (JASP)*.

3.7.1 Uji Kualitas Data

3.7.1.1 Uji Validitas

Menurut Ghazali, (2018), Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cermat suatu butir pernyataan dalam mengukur apa yang ingin diukur

dalam sebuah kuesioner. Suatu pernyataan tersebut dinyatakan valid apabila ada korelasi yang signifikan dengan skor total dengan kriteria pengambilan keputusan apabila memiliki nilai $\text{sig} < 0,05$ dan $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ pada tingkat signifikansi 0,05 uji 2 sisi.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali, (2018), Uji Reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Metode uji reliabilitas yang digunakan adalah metode *Cronbach's Alpha*. Dengan menggunakan *Cronbach's Alpha*, konstruk dianggap reliabel bila koefisien alfabanya $> 0,60$.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

3.7.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghazali, (2018), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi yang bentuknya seperti lonceng dan simetris. Pendekatan yang digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik normal *Q-Q Plot of regression standardized residual*. Output uji normalitas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Apabila $\text{sig} > 0.05$ maka data tersebut normal.
2. Apabila $\text{sig} < 0.05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

3.7.2.2 Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali, (2018), Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui suatu model regresi apakah mengalami gejala multikolonieritas dapat dilihat pada nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil perhitungan nilai *tolerance* >0.01 atau sama dengan nilai $VIF < 10$, maka model regresi dikatakan baik dan tidak terjadi gejala multikolonieritas.

3.7.2.3 Heterokedastisitas

Menurut Ghozali, (2018), Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Terdapat beberapa cara untuk menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode grafik (*Scatter Plot*) sebagai berikut :

1. Terjadi heteroskedastisitas, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit).
2. Tidak terjadi heterokedastisitas, jika seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

3.7.3 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Hamzah & Susanti, (2020), analisis regresi linear berganda adalah teknik analisis hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) dengan variabel dependen (Y). Analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing masing variabel independen

berhubungan positif atau negatif. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda karena terdapat lebih dari satu variabel independen, persamaan regresi yang dirumuskan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Kualitas Laporan Keuangan

a : Nilai Konstanta

b_1 : Koefisien Untuk *Good Governance*

b_2 : Koefisien Untuk Sistem Pengendalian Internal

X_1 : *Good Governance*

X_2 : Sistem Pengendalian Internal

3.7.4 Pengujian Hipotesis

3.7.4.1 Uji Statistik T

Uji statistik t digunakan untuk menguji secara statistik apakah nilai rata-rata dari dua skor sampel memiliki perbedaan yang berarti (signifikan) secara statistik. Uji statistik t digunakan untuk pengujian hipotesis pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Ada 2 cara untuk mengetahui uji T:

1. Berdasarkan nilai signifikansi
 - a. Jika nilai signifikansinya $< 0,05$ maka hipotesis diterima atau berpengaruh
 - b. Jika nilai signifikansinya $> 0,05$ maka hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh
2. Berdasarkan nilai perbandingan t hitung dan t tabel

- a. Jika nilai t hitung $> t$ tabel maka hipotesis diterima atau berpengaruh
- b. Jika nilai t hitung $< t$ tabel maka hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh

3.7.4.2 Uji Statistik F

Menurut Hartono, (2020), uji F digunakan untuk menentukan signifikansi keseluruhan model regresi berganda. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat signifikansi pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Ada 2 cara untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel dependen. Ada 2 cara untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y :

1. Berdasarkan nilai signifikansi
 - a. Jika nilai $\text{sig} < 0.05$ maka hipotesis diterima atau berpengaruh
 - b. Jika nilai $\text{sig} > 0.05$ maka hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh
2. Berdasarkan nilai perbandingan f hitung dan f tabel
 - a. Jika nilai f hitung $> f$ tabel maka hipotesis diterima atau berpengaruh
 - b. Jika nilai f hitung $< f$ tabel maka hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh

3.7.4.3 Uji Koefisien Determinasi Berganda

Koefisien determinasi (R^2) mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai *R-Square* atau *Adjusted R-Square*. *R-Square* digunakan jika terdiri dari satu variabel bebas (regresi linear sederhana), sedangkan *Adjusted R-Square* digunakan jika variabel independen lebih dari satu (regresi linear berganda).

Nilai koefisien determinasi berkisaran antara 0 – 1. Nilai R^2 yang kecil

menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan model semakin tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). *The Effect Of The Implementation Of Government Internal Control System (GICS) On The Quality Of Financial Reporting Of The Local Government And Its Impact On The Principles Of Good Governance : A Research In District, City, And Provincial Government* In So. 211, 811–818. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.172>
- Al Arif, M. N. R., & Mubarak, D. F. (2022). *Metode Riset Pada Ekonomi & Bisnis*. CV PUSTAKA SETIA.
- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. CV. ANDI OFFSET.
- Bahri, S. (2020). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. PENERBIT ANDI.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gita Saraswati, I. G. A., & Budiasih, I. G. A. N. (2019). Pengaruh *Good Governance*, Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2268. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p23>
- Hamzah, A., & Susanti, L. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Literasi Nusantara.
- Hartono. (2020). *Metodologi Penelitian Skripsi dengan SPSS*. CV BUDI UTAMA.
- Hasanah, N. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. IN MEDIA.
- Hery. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Grasindo.
- Hery. (2019). *Intisari Konsep Dasar Akuntansi*. PT Grasindo.
- Khairunnas, Erawati, T., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan *Good Governance*. 3(September), 483–497.
- Lis Maryani, N. (2016). Pengaruh *Good Governance* Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 1–29.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. PENERBIT ANDI.
- Mulyadi. (2015). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah RI. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sistem Pengendalian Intern (PP Nomor 60 Tahun 2008).

Peraturan Pemerintah RI. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 71 Tahun 2010).

Philadelphiah, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance*, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2(1), 17–35.

Priansa, D. J. (2017). Manajemen Pelayanan Prima. ALFABETA.

Priyatno, D. (2017). Paduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS. CV. ANDI OFFSET.

Rahman, Y., Rahmawati, R., & Fauziannor. (2023). Pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badarudin Kasim Tanjung Kabupaten Tabalong. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (S4), 5(Juli), 1–12.

Rahmasari, R. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi.

Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi, 20(2), 8–17.

Santosa, P. I. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. CV. ANDI OFFSET.

Sari, fangela myas. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, *Good Governance*, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Batang). 3(1), 27–42.

Siahaya, A., & Sandanafu, S. P. (2022). *The Effect Of Good Governance Implementation, Government Accounting Standards, Effectiveness Of Internal Control System And Human Resource Quality On The Quality Of Regional Task Force Financial Statements*. 20(1), 105–123.

Simon, Y. (2016). *The Role Of Apparatus Competence, Internal Control System On Good Governance And The Quality Of Financial Statement Information*. 123–132.

Siregar, baldric. (2017). Akuntansi Sektor Publik. UPP STIM YKPN.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. ALFABETA.

- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. ALFABETA.
- Sujarweni, V. W. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif. PUSTAKABARUPRESS.
- Sukamulja, S. (2019). Analisis Laporan Keuangan sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi. PENERBIT ANDI.
- Wastam, W. H. (2018). Dasar-dasar Analisa Laporan Keuangan. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Yulanda, D., & Oktala, R. (2021). Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Seksi Keuangan POLRES. JOMB: Journal of Management and Bussines, 3(1), 1–9.

CURRICULUM VITAE



A. Data Pribadi

Nama : Tri Julita Putri
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Batam, 02 Juli 2001
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
E-mail : Trijulitaputri27@gmail.com
Alamat : Jl. Matador Gg. Rambo No. 09

B. Riwayat Pendidikan

Tingkat Sekolah	Nama Sekolah
Sekolah Dasar	SDN 002 Bukit Bestari
Sekolah Menengah Pertama	SMPN 4 Tanjungpinang
Sekolah Menengah Atas	SMAN 1 Tanjungpinang
Perguruan Tinggi	STIE Pembangunan Tanjungpinang